

Implementasi *E-Government* untuk Transparansi Laporan Keuangan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

M. Alwi Hasyim¹, Rozali Ilham²

^{1,2}Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Email: ¹hasyimaw13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi e-government untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Studi ini berfokus pada pengembangan dan penerapan sistem informasi kecamatan serta aplikasi *Smart Village* sebagai bagian dari inisiatif e-government untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen perencanaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government di Kecamatan Metro Pusat telah meningkatkan transparansi laporan keuangan, mempercepat proses administratif, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan publik. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan e-government di tingkat kecamatan sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan daerah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola keuangan publik yang lebih terbuka dan inklusif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, E-Government, Keuangan Publik, Kecamatan Metro Pusat, Transparansi, Smart Village

Abstract

This study examines the implementation of e-government to enhance the transparency of financial reporting in Metro Pusat Subdistrict, Metro City. It focuses on the development and application of subdistrict information systems and the Smart Village application as part of the e-government initiative aimed at improving transparency, accountability, and efficiency in regional financial management. The research method employed includes literature review and analysis of budget planning documents. The findings reveal that e-government implementation in Metro Pusat Subdistrict has improved financial transparency, accelerated administrative processes, and encouraged community participation in public financial oversight. These results highlight the urgency of adopting e-government at the subdistrict level as a foundation for digital transformation in local governance, contributing to more open and inclusive public financial management.

Keywords: Accountability, E-Government, Metro Pusat Subdistrict, Public Finance, Smart Village, Transparency

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah e-government, yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi layanan publik (Jafar, 2024). Di Indonesia, arah kebijakan ini diperkuat oleh Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menegaskan e-government sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan perwujudan *good governance*.

Transparansi laporan keuangan publik merupakan pilar penting dalam e-government karena mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik. Rafael et al. (2024) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Kristian et al. (2020) menambahkan bahwa dimensi transparansi mencakup ketersediaan, aksesibilitas, dan jaminan hukum atas data keuangan. Temuan

terbaru dari Wulandari & Yuliati (2023) menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan kontrol anggaran di pemerintah daerah.

Kecamatan Metro Pusat di Kota Metro, Provinsi Lampung, merupakan salah satu wilayah yang menginisiasi e-government melalui pengembangan aplikasi *Smart Village* dan Sistem Informasi Kecamatan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024, dana sebesar Rp23.000.000 dialokasikan untuk pengembangan sistem digital ini. Inisiatif tersebut berlandaskan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No. 61 Tahun 2010 yang menegaskan hak publik atas informasi. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi SDM, dan resistensi terhadap digitalisasi. Studi Kurhayadi (2019) mengungkapkan bahwa publikasi data keuangan melalui situs web pemerintah berdampak positif terhadap keterbukaan, namun keberhasilan ini sangat bergantung pada integrasi sistem dan dukungan berkelanjutan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi e-government untuk transparansi laporan keuangan di tingkat kecamatan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, hingga resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi e-government untuk transparansi laporan keuangan di Kecamatan Metro Pusat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan dan peningkatan di masa depan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model implementasi e-government di tingkat kecamatan yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek transparansi laporan keuangan. Temuan penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan e-government di Kecamatan Metro Pusat pada khususnya dan pemerintahan daerah pada umumnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi e-government dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan di Kecamatan Metro Pusat. Metode utama pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur mencakup referensi dari jurnal ilmiah, buku, serta regulasi nasional terkait e-government dan transparansi keuangan. Sementara itu, dokumen yang dianalisis meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), laporan keuangan kecamatan, serta dokumen peraturan daerah dan petunjuk teknis implementasi sistem e-government lokal.

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis konten dan analisis tematik, untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait efektivitas penerapan e-government, hambatan yang dihadapi, serta kontribusi sistem terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik. Validitas data diperkuat dengan melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari dokumen resmi dengan temuan literatur akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil E-Government di Kecamatan Metro Pusat

Kecamatan Metro Pusat, sebagai wilayah administratif strategis di Kota Metro, Provinsi Lampung, telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam mengimplementasikan e-government sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2021), implementasi e-government di kecamatan ini berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip *good governance*.

Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan website resmi kecamatan (kecmetropusat.metrokota.go.id) yang berfungsi sebagai pusat informasi digital yang menyediakan berbagai konten publik, mulai dari profil wilayah hingga informasi layanan administratif seperti

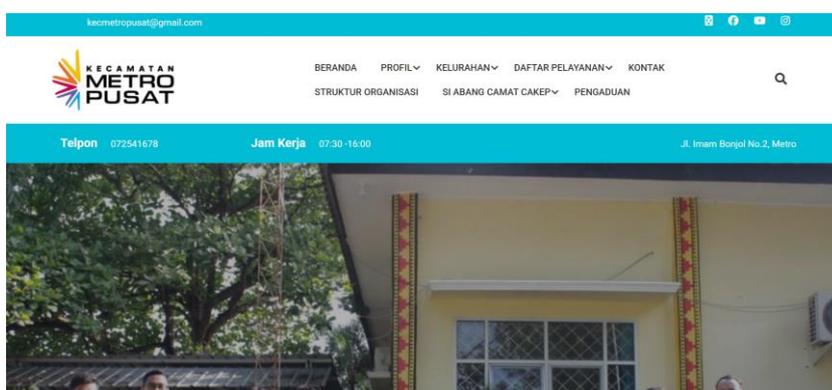
verifikasi akta kelahiran dan kartu keluarga. Website ini memainkan peran kunci dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah kecamatan dan masyarakat, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, Kecamatan Metro Pusat juga mengembangkan Sistem Informasi Kecamatan (SIK) yang didanai melalui alokasi anggaran Rp15.000.000 pada tahun 2024, seperti yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. SIK ini dirancang untuk mengintegrasikan proses administratif internal yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan surat menyurat, pendataan kependudukan, hingga pelaporan kegiatan harian dan bulanan. Sistem ini meningkatkan efisiensi kerja aparatur kecamatan karena data dapat diakses dengan cepat, akurat, dan secara real-time, yang sejalan dengan teori e-government yang menyatakan bahwa integrasi sistem informasi berkontribusi pada peningkatan efisiensi birokrasi (Isnaeni & Nurcahyanto, 2024).

Tak hanya di tingkat kecamatan, digitalisasi ini juga diperluas melalui pengembangan Aplikasi Smart Village, yang mendapatkan anggaran sebesar Rp8.000.000 pada tahun 2024. Aplikasi ini mendukung kelurahan di bawah Kecamatan Metro Pusat untuk mengadopsi teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis desa, seperti pengajuan surat pengantar, pelaporan data penduduk, dan sistem pengaduan masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi layanan tidak hanya terbatas pada administrasi kecamatan, tetapi merambah hingga ke unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sejalan dengan konsep *Smart Village* yang terbukti meningkatkan efisiensi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan (Khaerunisa et al., 2024).

Pentingnya infrastruktur teknologi yang memadai juga tidak diabaikan. Pemerintah kecamatan telah mengalokasikan dana sebesar Rp38.400.000 pada tahun 2024 untuk pengadaan perangkat keras, seperti PC All in One, printer, dan peralatan komputer lainnya. Infrastruktur ini memastikan kelancaran operasional sistem informasi dan pelayanan yang optimal bagi warga yang mengakses layanan baik secara daring maupun langsung di kantor kecamatan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan kebijakan nasional dan daerah yang mengarahkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku.

Komitmen kuat dari pimpinan daerah, baik di tingkat kota maupun kecamatan, memperkuat keberlanjutan program ini, menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya proyek sementara, tetapi bagian dari visi jangka panjang untuk membangun birokrasi modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui sinergi antara kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat, Kecamatan Metro Pusat berupaya menjadikan e-government sebagai fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing di era digital.



Gambar 1. Tampilan Website Kecamatan Metro Pusat

3.2. Implementasi E-Government Untuk Transparansi Laporan Keuangan

Implementasi e-government di Kecamatan Metro Pusat memainkan peran sentral dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan publik, yang sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Berdasarkan analisis dokumen perencanaan anggaran dan pemanfaatan website resmi Kecamatan Metro Pusat, transparansi anggaran menjadi lebih mudah diakses oleh

masyarakat. Dokumen-dokumen seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja rutin dipublikasikan di situs kecamatan (kecmetropusat.metrokota.go.id), memberikan gambaran menyeluruh mengenai perencanaan dan penggunaan dana publik. Sebagai contoh, pada tahun 2024, alokasi anggaran sebesar Rp132.030.000 digunakan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rinciannya meliputi pengadaan peralatan kantor. Publikasi ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya mengetahui ke mana anggaran dialokasikan, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan anggaran dan memberi masukan terkait kebijakan yang diterapkan.

Transparansi ini mendukung prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis (Wijaya & Saleh, 2025). Dengan memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi anggaran, Kecamatan Metro Pusat mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan, yang merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Selain publikasi anggaran, Kecamatan Metro Pusat juga mengembangkan Sistem Informasi Kecamatan (SIK), yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000 pada tahun 2024. SIK ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi administratif dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan, yang memungkinkan pencatatan transaksi dan penggunaan anggaran secara real-time. Dengan integrasi ini, setiap transaksi dapat langsung dimasukkan ke dalam sistem tanpa penundaan, yang menjamin ketepatan dan akurasi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Sekedang & Napitupulu (2025) yang menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi dalam e-government dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan daerah, terutama dalam hal ketepatan waktu dan akurasi data yang disajikan.

Upaya ini tidak hanya terbatas pada tingkat kecamatan, tetapi juga meluas hingga ke tingkat kelurahan melalui pengembangan Aplikasi Smart Village, yang mendapat anggaran sebesar Rp8.000.000 pada tahun 2024. Aplikasi ini memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan kelurahan dengan menyediakan platform digital untuk pengelolaan anggaran dan laporan penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik di wilayah mereka, mendorong budaya partisipatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal. Nurfaishal et al. (2024) menyatakan bahwa implementasi aplikasi digital semacam Smart Village dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, yang memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dampak lain dari penerapan e-government di Kecamatan Metro Pusat adalah peningkatan efisiensi administratif. Penggunaan sistem informasi dan aplikasi digital telah mengotomatisasi banyak proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Otomatisasi ini mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pengolahan data, yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan tepat waktu. Sistem yang terintegrasi ini tidak hanya mempermudah proses pencatatan dan pelaporan tetapi juga mengurangi kemungkinan kehilangan data. Penemuan ini sejalan dengan Viani & Choiriyah (2021) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pelaporan keuangan di tingkat kecamatan.

Secara keseluruhan, implementasi e-government di Kecamatan Metro Pusat bukan hanya sebagai upaya modernisasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas publik. Dengan memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki pengelolaan dan pelaporan keuangan, kecamatan ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan terpercaya dalam era digital.

3.3. Dampak Implementasi E-Government terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Implementasi e-government di Kecamatan Metro Pusat memberikan dampak signifikan terhadap transparansi laporan keuangan, yang dapat diamati dari berbagai aspek yang saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Salah satu dampak yang paling nyata adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi keuangan publik. Melalui website resmi Kecamatan Metro Pusat (kecmetropusat.metrokota.go.id),

masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi penting, seperti rincian alokasi anggaran, laporan realisasi penggunaan dana, dan kegiatan pembangunan yang didanai oleh anggaran publik. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi warga untuk memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan, meningkatkan efisiensi dan sesuai dengan prinsip transparansi yang dijelaskan oleh Kaylaputri & Kismartini (2025), yaitu ketersediaan informasi yang siap pakai, mudah dijangkau, bebas diakses, dan tepat waktu.

Transparansi ini mencerminkan implementasi konkret dari prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi demi penguatan demokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan membuka akses informasi secara terbuka, Kecamatan Metro Pusat berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, ketersediaan informasi keuangan secara digital mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Website resmi kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi, tetapi juga menyediakan fitur interaktif, seperti kolom kritik dan saran, yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan fitur ini, masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan pertanyaan, atau mengkritisi kebijakan anggaran yang dirasa kurang tepat. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* yang sehat, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aprilla et al. (2024) mengemukakan bahwa transparansi keuangan melalui media digital mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, yang berujung pada minimisasi potensi penyalahgunaan anggaran dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Di sisi lain, dari aspek teknis dan administratif, implementasi e-government juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi dan akurasi dalam proses pelaporan keuangan. Dengan adanya Sistem Informasi Kecamatan serta dukungan aplikasi pendukung lainnya, proses administrasi keuangan yang sebelumnya memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan kini dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Integrasi ini secara signifikan mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual, mempercepat proses penyusunan laporan, dan memastikan akurasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Efisiensi dan akurasi ini merupakan indikator kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menekankan pentingnya laporan yang transparan, tepat waktu, dan berbasis prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dampak positif lain dari penerapan e-government juga tercermin dalam optimalisasi penggunaan anggaran yang semakin terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan adanya transparansi pada setiap tahap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, pemerintah kecamatan terdorong untuk menggunakan anggaran secara lebih bijak dan efisien. Pengawasan yang dilakukan masyarakat melalui akses informasi digital memperkuat komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat yang optimal. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, yang menunjukkan fokus pada pengembangan infrastruktur teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik, seperti pengadaan dua unit PC All in One senilai Rp36.000.000, dua unit printer senilai Rp2.400.000, serta anggaran Rp23.000.000 untuk pengembangan aplikasi. Alokasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam memperkuat infrastruktur digital, tetapi juga menunjukkan bahwa transparansi telah menjadi fondasi dalam proses pengambilan keputusan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.

3.4. Tantangan dalam Implementasi E-Government untuk Transparansi Laporan Keuangan

Meskipun implementasi e-government di Kecamatan Metro Pusat telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius agar keberlanjutan dan efektivitas implementasi e-government dapat terjaga.

a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Meskipun ada alokasi anggaran yang cukup untuk pengadaan perangkat keras, seperti dua unit PC All in One senilai Rp36.000.000 dan dua unit printer senilai Rp2.400.000, jumlah dan jenis perangkat ini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh unit kerja yang terlibat dalam proses e-government. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem informasi dan pelayanan digital, yang pada gilirannya dapat mengganggu kelancaran proses pencatatan, pelaporan, dan transparansi keuangan. Rifdan et al. (2024) menyatakan bahwa tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai adalah prasyarat penting bagi keberhasilan e-government, terutama di tingkat pemerintahan kecamatan yang berfungsi sebagai garda terdepan pelayanan publik.

b. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain infrastruktur, tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan mengoperasikan sistem e-government. Berdasarkan analisis terhadap dokumen perencanaan, belum terlihat adanya alokasi anggaran khusus untuk pelatihan atau pengembangan kapasitas pegawai dalam bidang teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi keuangan dan aplikasi e-government lainnya. Padahal, keberhasilan implementasi teknologi dalam pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan SDM untuk memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Tanpa peningkatan kompetensi pegawai, potensi teknologi untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang berkesinambungan untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM, baik melalui pelatihan teknis, workshop, maupun program sertifikasi yang relevan.

c. Kurangnya Integrasi Antar Sistem

Tantangan berikutnya adalah kurangnya integrasi antar sistem yang dikembangkan oleh Kecamatan Metro Pusat. Meskipun telah ada berbagai platform digital, seperti website resmi, Sistem Informasi Kecamatan, dan aplikasi Smart Village, namun belum terlihat adanya sinergi yang optimal antara sistem-sistem tersebut. Ketidakterpaduan ini mengakibatkan terhambatnya aliran data dan informasi, yang berdampak pada ketidakefisienan dan ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan. Nurfaizah et al. (2020) menekankan bahwa integrasi sistem merupakan elemen kunci dalam efektivitas e-government, terutama dalam mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah kecamatan untuk merancang sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh, agar proses administrasi dan pelaporan keuangan dapat berjalan lebih lancar, transparan, dan efisien.

d. Aspek Keberlanjutan dan Pemeliharaan Sistem

Tantangan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah aspek keberlanjutan dan pemeliharaan sistem informasi. Berdasarkan analisis terhadap DPA Tahun Anggaran 2024, tidak ditemukan pos anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan sistem atau pengembangan berkelanjutan. Padahal, untuk menjaga relevansi dan fungsi optimal dari sistem informasi, diperlukan pembaruan berkala, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, maupun keamanan data. Tanpa pemeliharaan sistem, risiko terjadinya kerusakan, penurunan performa, hingga kegagalan sistem dalam jangka panjang akan meningkat, yang tentunya akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan transparansi laporan keuangan yang telah dibangun. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kebijakan anggaran yang berpihak pada pemeliharaan dan pembaruan sistem secara periodik, sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan prinsip good governance di lingkungan Kecamatan Metro Pusat.

4. KESIMPULAN

Implementasi e-government di Kecamatan Metro Pusat telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan. Hal ini terlihat dari kemudahan akses masyarakat terhadap informasi anggaran yang kini dapat diperoleh secara daring melalui website resmi kecamatan. Selain itu, keberadaan fitur interaktif seperti kritik dan saran turut mendorong partisipasi publik dalam pengawasan keuangan, yang semakin memperkuat prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam pemerintahan. Pengembangan Sistem Informasi Kecamatan dan aplikasi Smart Village juga menjadi

terobosan penting dalam memperluas integrasi sistem informasi dari tingkat kecamatan ke kelurahan, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif tetapi juga meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan pengelolaan yang lebih akurat dan tepat waktu.

Namun demikian, meskipun dampak positif sudah mulai terlihat, implementasi e-government ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan keberlanjutan sistem menjadi tantangan utama yang dapat menghambat kelancaran dan efektivitas implementasi e-government. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kecamatan untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

Ke depannya, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi e-government, penting untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dengan memperbaiki jaringan dan perangkat yang ada. Selain itu, pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan akan memastikan pengelolaan yang lebih optimal terhadap sistem e-government yang diterapkan. Integrasi sistem informasi yang lebih baik juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan aliran data antar platform yang ada, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara lebih efisien dan akurat. Pemeliharaan sistem informasi juga harus menjadi prioritas dengan adanya alokasi anggaran rutin untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan berfungsi dengan baik dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, implementasi e-government telah menjadi fondasi yang kuat dalam transformasi digital pemerintahan daerah. Meski demikian, untuk memastikan sistem ini dapat berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang, perlu adanya evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk mendorong inovasi dalam penerapan e-government yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, e-government dapat terus menjadi alat yang efektif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilla, W., Wulandari, M. Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321-334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Isnaeni, L.N., (2024). *Implementasi E-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung*. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Jafar AW. M. (2024). Dampak E-Government dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 204–226. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1303>
- Kaylaputri, A.S., & Kismartini. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Pada Pelayanan Publik Di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 1340-1355. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.50847>
- Kharunisa, S., Syamsudin, U., Rantau, M.I. (2024). Implementasi Smart Village dalam Mewujudkan Desa Digital di Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8386-8400. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14812>
- Kristian, I., Nuradhawati, R., Ristala, H. (2024). Peran E-Government Dalam Meningkatkan Transparansi Publik Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung). *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 7(2), 252-263. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v7i2.2837>
- Kristian, I., Rahma, A.F., Nugraha, B., Putri, C.A. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 11-22. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v18i3.70>

- Kurhayadi. (2019). Dampak Sistem E-Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 1(3), 25-34. <https://doi.org/10.54783/jin.v1i3.549>
- Nurfaisal, M.D., Maulana, M.A., Sari, I. (2024). Akuntabilitas Program Kemandirian Desa Berbasis Smart village: Studi Kasus Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 4(2), 97-108. <https://doi.org/10.47134/rapik.v4i2.68>
- Rafael, K., Gamaliel, H., Korompis, C.W.M. (2024). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 19(1), 52-63. <https://doi.org/10.35794/gc.v19i3.56785>
- Rifdan., Haerul., Sakawati, H., Yamin, M.N. (2024). Analisis Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 4(1), 49-61. Retrieved from <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/389>
- Sekedang, Y.Y., & Napitupulu, I.H. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Perguruan Tinggi: Studi Kasus Implementasi E-Government di Politeknik Negeri Medan. *Kirana: Social Science Journal*, 2(2), 39-47. <https://doi.org/10.61579/kirana.v2i2.375>
- Viani, D.O., & Choiriyah. (2021). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Kecamatan Babat Toman. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 1(1), 49-60. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.7>
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2154–2164. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4201>
- Wulandari, A.D., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(1), 637-649. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6217>